

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Analisis Implementasi Kebijakan Polda Lampung Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Markas Polisi Daerah Lampung)

Ahmad Mofian

Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Kabupaten Lampung Timur

Dwi Wijayanto

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Kapasitas Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Karyawati

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung

Nurdiansyah

Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung

Refly Setiawan

Strategi Kedisiplinan Guru Dan Tenaga Administrasi Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik (Studi Pada SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Sutamto

Pengaruh Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan Di Sman 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Winingsih



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 2 Agustus 2016

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Vida Yunia Cancer, S.A.N

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 2 Agustus 2016

DAFTAR ISI

Analisis Implementasi Kebijakan Polda Lampung Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Markas Polisi Daerah Lampung)	1-11
Ahmad Mofian	
Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial Kabupaten Lampung Timur	12-18
Dwi Wijayanto	
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Kapasitas Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	19-30
Karyawati	
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	31-45
Nurdiansyah	
Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung	46-57
Refly Setiawan	
Strategi Kedisiplinan Guru Dan Tenaga Administrasi Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik (Studi Pada SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan)	58-69
Sutamto	
Pengaruh Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan Di Sman 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	70-82
Winingsih	

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI
SMAN 1 BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN**

OLEH

WININGSIH, MAHASISWA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ABSTRACT

The Government generally provides Operational Assistance Funds schools high school to realize the service quality and affordable education for all walks of life, the existence of government assistance provided so that frees school education costs or relieve the Bills school fees and also so that the quality of the learning process in schools will be increased.

This research uses descriptive quantitative analysis design, with the implementation of the use of the operational grant School made an independent variable and the dependent variable as a quality education. The samples used in the study amounted to 50 respondents with a random method of proportionally (proportional random sampling). The analysis used a test validity, reliability test and analysis of simple linear regression.

Based on the results of the study can then note that: (1) implementation of the use of the operational grant School signifikan positive effect on quality High school 1 Blambangan Umpu Way Kananit looks from the supporting indicators or indicators with highest value i.e. the bureaucratic structure (bureaucratic structure) and the indicators are hampered or having the lowest score is the disposition (disposition). (2) aspects that become advocates and a barrier to the implementation of the use of the operational grant school to quality High school 1 Blambangan Umpu Way Kanan, among other things: (a) aspects that become advocates namely good sinergisitas between the school committee, the principal as well as educators in making the school budget plan and management of the operational grant school, (b) restricting aspects namely the hassle in the preparation of the report of the accountability, delay in disbursement, the decline in educational services in particular extracurricular activities and less pahamiya society

Keywords: School Operational Assistance, The Quality of Education

A. Pendahuluan

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain sosial dan ekonomi, dari sudut pandang sosiologi, pendidikan adalah alat untuk mentransfer nilai-nilai luhur dan budaya dari suatu masyarakat kepada generasi muda, sekaligus dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan budaya tersebut, (Karsidi, 2007:89). Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, pendidikan memberi sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan,

keterampilan, kecakapan, sikap dan produktifitas, (Fatah, 2006:87). Selain itu pendidikan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan

prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global.

Salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005 jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama kali diluncurkan. Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya pemberian pendidikan gratis bagi peserta didik di tingkat menengah, sehingga hal ini juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan gratis di tingkat menengah, maka sejak tahun 2005 salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun dan tingkat menengah yang bermutu dan berkualitas. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran, (Mulyasa, 2004:194).

Pemerintah secara umum memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. Besaran dana tahun 2014 dan 2015 yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA ini diberikan ke sekolah per semester.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib berpedoman pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengelolaan dana dan segala sumber

daya yang ada dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yaitu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Hasil wawancara dengan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, diperoleh informasi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di mana pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terdiri dari dua tahap penyaluran. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per Juli s/d Desember 2015 uang sejumlah Rp.462.000.000,00. Tahap pencairan bulan Agustus 2015 Rp.302.000.000,00 dan bulan Oktober Rp.160.000.000,00. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per Januari s/d Desember 2014 sejumlah Rp.505.600.000,00. Tahap pencairan bulan Agustus 2014 Rp.54.600.000,00 bulan September 2014 Rp.295.000.000,00 dan bulan Oktober 2014 Rp.156.000.000,00 serta jika terdapat kelebihan dari dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) maka Sekolah wajib mengembalikan kelebihan dana ke Pusat.

Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tahun 2014 dan 2015 banyak terdapat hambatan yang terjadi. Dimulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang telah disusun Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dimintai tindak lanjut kepada Pusat, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RAB Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan dana RAB Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang baru. Penyusunan perubahan RAB Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA ini, menjadikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA ke sekolah terlambat. Penyusunan RAB Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA harus sesuai dengan juknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dari pusat masuk ke rekening sekolah serta pengawasan dilakukan oleh pengawas provinsi sehingga dengan demikian sangat rawan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah.

Secara empiris dalam pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tepat waktu sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar, dengan terhambatnya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh sekolah maka akan mempengaruhi prestasi akademik peserta didik di mana prestasi peserta didik SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan belum mampu

berkembang secara baik di tingkat provinsi dan nasional walaupun di tingkat kabupaten prestasi peserta didik sudah cukup baik

2. Kurang berkembangnya prestasi peserta didik SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan di tingkat provinsi dan nasional di akibatkan dari kurang idealnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah sehingga hal ini menyebabkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berjalan kurang optimal
3. Kurang optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan artinya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diketahui oleh *stakeholder* sekolah. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah maupun masyarakat
4. Rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga mengakibatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada pengaruh implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan? (2) Aspek-aspek apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Penggunaan Dana

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), (Wahab, 2008:64). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Berbicara tentang implementasi pembahasannya akan mengarah pada masalah penerapan/pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. Definisi tentang implementasi dapat dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan implementasi sebagai 1), Pelaksanaan 2),

Penerapan. Jika dipandang maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan. Kebijaksanaan biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif. Dalam hubungannya dengan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi diberi batasan pada kenyataan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Mulyono, (2008:189). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu memebuhi biaya operasional non personalia sekolah. Sebagai wujud keterpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah wajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/provinsi yang telah

menerapkan pendidikan gratis sekolah tidak mewajibkan memberikan pembebasan membantu siswa. Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya bantuan, (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA tahun 2015, 2015:3).

3. Kualitas Pendidikan

Kualitas sekolah (pendidikan) adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Secara umum, kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat, Rini, (2011:81). kualitas mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun yang *intangible* (tidak dapat dipegang), Suryosubroto, (2010:210).

Sesuatu yang berkualitas merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli, produk yang berkualitas adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Kualitas dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki "kualitas" akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya, Sallis, (2006:52).

Kualitas berarti sesuatu yang dinilai dari tingkat keunggulan, kualitas dalam konsep yang absolut berarti harus *high quality* atau *top quality*. Kualitas yang

absolut ialah kualitas yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, mahal, sangat mewah dan jarang dimiliki orang. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah serta perabot mewah. Pengertian kualitas dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan, proses pendidikan yang berkualitas melibatkan berbagai *input* seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Kualitas dalam pendidikan untuk menjamin kualitas *input*, proses, produk/*output* dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah, *input* pendidikan dinyatakan berkualitas jika siap diproses.

C. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *explanatory survey*, Menurut Singarimbun dan Effendi, (1989:3) survey eksplanatori merupakan penyelidikan kausalitas dengan cara mendasarkan pada pengamatan terhadap pengaruh yang terjadi, yaitu melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data, dengan menganalisis pengaruh variabel implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai variabel bebas (*independent variable*) terhadap kualitas pendidikan sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu selain menggambarkan dan mendeskripsikan fakta empirik yang ditemukan di lapangan, juga akan melakukan analisis inferensial antara variabel bebas dan variabel terikat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

- a. Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk angket dengan menggunakan skala ordinal 1–5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval.
- b. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut
- c. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian dalam aplikasinya selama proses penelitian, peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linier sederhana, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (X) terhadap variabel dependen yaitu kualitas pendidikan (Y). Rumus persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan:

X = Implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Y = Kualitas pendidikan

a = Bilangan konstanta

b = Koefisien regresi

e = Episol (variabel yang tidak diteliti).

D. Hasil Penelitian

1. Pengaruh implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Hasil uji hipotesis diketahui bahwa implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan hal itu bisa dilihat dari nilai t_{hitung} variabel implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 66.419 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.677, jadi $t_{hitung} 66.419 > t_{tabel} 1.677$ yang artinya hipotesis H1 dalam penelitian di terima. Sedangkan di lihat dari Koefesien Determinasi (R Square) diperoleh nilai sebesar 0.989 artinya implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki pengaruh sebesar 98.9% terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Hasil nilai dari tabulasi untuk variabel implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (X) di ketahui bahwa nilai tertinggi sebesar 218 dengan nilai rata-rata 4.36 di mana nilai

tertinggi ada 3 (tiga) pernyataan salah satunya adalah pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selalu di laksanakan oleh sekolah sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis dari pemerintah hal itu dilakukan agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat berjalan dengan efektif, efesien dan tepat sasaran.

Nilai terendah dari tabulasi variabel implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (X) diperoleh skor sebesar 206 dengan nilai rata-rata sebesar 4.12 sebanyak 3 (tiga) pernyataan dengan salah satu pernyataannya adalah pelaksana dan pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki kompetensi yang baik sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya pelaksana memiliki pemahaman serta tahu bagaimana dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai dengan petunjuk teknis sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kompetensi pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan pelaksanaan dapat berjalan optimal karena memiliki sumber daya pelaksana yang berkualitas dan berkompeten.

Nilai tertinggi dari tabulasi untuk variabel kualitas pendidikan (Y) diperoleh skor sebesar 218 dengan nilai rata-rata sebesar 4.36 di mana nilai tertinggi ada 4 (empat) pernyataan salah satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru selalu memberikan penanaman sikap dan nilai-nilai pendidikan kepada siswa dalam berbagai kegiatan di sekolah berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pendidikan karakter dengan cara menanamkan nilai-nilai pendidikan

karakter dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam sekolah dengan cara guru selalu memberikan contoh menanamkan pendidikan karakter dalam kehidupan di lingkungan sekolah sehingga peserta didik berusaha untuk meneladani sikap dan karakter guru.

Nilai terendah dari tabulasi untuk variabel kualitas pendidikan (Y) diperoleh skor sebesar 206 dengan nilai rata-rata sebesar 4.12 terdapat 3 (tiga) pernyataan salah satunya adalah guru sudah mampu menyusun manajerial pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran sesuai dengan perencanaan berdasarkan pernyataan tersebut maka di indikasikan bahwa sampai saat ini guru di sekolah belum sepenuhnya mampu menyusun manajerial pembelajaran dengan baik selama guru selalu mendapatkan bimbingan dari kepala sekolah dalam menyusun manajerial pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan maka dapat diketahui bahwa dari empat indikator, yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah indikator struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) di mana jumlah skor berdasarkan hasil tabulasi sebesar 859, sedangkan indikator yang menjadi penghambat atau indikator yang memiliki skor rendah berdasarkan tabel tabulasi adalah disposisi (*disposition*) dengan nilai skor sebesar 842.

2. Aspek-Aspek yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

- a. Aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya keringanan biaya sumbangan bagi siswa miskin. Oleh karenanya, program ini telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan di satu sisi, besarnya dana yang diterima sangat membantu meringankan beban orang tua dan instansi pendidikan dalam pembiayaan sekolah dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.

Adanya peran komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BOS di sekolah terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, anggota yaitu wakil kepala sekolah, bendahara, satu orang tenaga pendidik dan komite sekolah di mana kepala sekolah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah sementara Komite Sekolah memantau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari unsur-

unsur masyarakat, seperti dewan guru, tokoh masyarakat, dan orang tua/wali murid dan pembentukannya harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.

Kebijakan implementasinya di lapangan dilihat dari permasalahan yang muncul di lokasi penelitian berkaitan dengan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kebijakan sekolah gratis yang dilakukan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan, dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa sekolah gratis tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan dasar.

Implementasi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikurcurkan menjadi sorotan bagi masyarakat dimana realisasi dana di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat di buku petunjuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas (*top down policy*) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan.

Kebijakan sekolah gratis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dasar. Sehingga dengan demikian maka dapat diketahui bahwa bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah adanya sinergisitas yang baik antara komite sekolah, kepala sekolah serta tenaga pendidik dalam membuat Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- b. Aspek-aspek penghambat dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sudah dapat berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa program yang terlihat kurang optimal, sehingga ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

Kendala ini bersifat intern bagi sekolah terutama bagi pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan

yang ada, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggung jawabannya terdapat kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggung jawabannya.

Penyusunannya membutuhkan pemikiran yang teliti dan harus di tambah dengan jangka waktu yang sangat singkat padahal laporan pertanggung jawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas. Kepala Sekolah SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menambahkan bahwa dalam penggunaan dana itu sangat dibatasi untuk hal apa saja, padahal kenyataannya banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan penggunaan dana tersebut dan pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam aturan di buku pedoman pelaksanaan pendidikan gratis itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

- 2) Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik dalam kenyataannya, kegiatan ekstrakurikuler sangat menunjang kegiatan akademik sekolah karena dengan ekstrakurikuler, kualitas sekolah akan terlihat bermutu atau tidak seperti halnya kegiatan lomba, kualitas sebuah sekolah akan terlihat disitu.

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa penurunan layanan kualitas di sekolah tersebut sangat mungkin terjadi mengingat masih banyaknya guru yang belum terjamin kesejahteraannya, apalagi dengan adanya kebijakan sekolah gratis, guru-guru tidak lagi dimungkinkan menerima insentif khusus dari masyarakat. Penjelasan dari guru SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menambahkan bahwa kegiatan di luar jam akademik itu sangat banyak macamnya, misalnya kegiatan pramuka, voli, sepak bola, komputer dan lain-lain yang kesemuanya itu membutuhkan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Padahal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan itu masih kurang apabila untuk mencukupi semua yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan kata

lain, pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana prasaranya tercukupi. Untuk mencukupinya sekolah harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal kepada pemerintah, tapi kenyataannya menunggu cukup lama untuk turunnya dana itu dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan seadanya terlebih dahulu.

3) Kurang Pahaminya Masyarakat tentang program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kurang pahamnya masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat masyarakat membuat salah persepsi di mana pandangan masyarakat terhadap kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi. Jadi masyarakat menganggap bahwa dengan adanya pendidikan gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Padahal yang dimaksud gratis disini adalah mengenai pembiayaan seluruh kegiatan operasional seperti SPP, biaya dari komite atau dana pembangunan, pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, daftar ulang, foto copy panitia, konsumsi panitia, uang lembur panitia dan lain sebagainya. Begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian

buku referensi dan buku teks pelajaran koleksi di perpustakaan.

Kepala Sekolah SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih belum begitu mengerti dengan seksama apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan gratis ini serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis itu adalah gratis secara penuh, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua, hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dibiayai melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

E. Kesimpulan

1. Implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, hal itu terlihat dari indikator pendukung atau indikator dengan nilai tertinggi yaitu struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berdasarkan indikator tersebut terlihat penyaluran dana BOS sudah mulai tepat waktu, sosialisasi penggunaan dana BOS dilakukan secara komprehensif, pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan secara sistematis dan pemerintah sudah mulai intensif

melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS. Sedangkan indikator yang menjadi penghambat atau memiliki skor terendah adalah disposisi (*disposition*) hal itu terlihat dari belum adanya pengawasan secara intensif dan berkesinambungan, evaluasi pengelolaan dana BOS belum dilakukan secara optimal, pelaporan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel dan transparan, belum adanya publikasi perencanaan penggunaan dana BOS oleh sekolah dan adanya perbedaan antara data siswa yang ada di sekolah dengan data yang diberikan kepada pemerintah demi mendapatkan dana BOS lebih banyak

2. Aspek-aspek yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, antara lain:
 - a. Aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan adalah adanya sinergisitas yang baik antara komite sekolah, kepala sekolah serta tenaga pendidik dalam membuat Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - b. Aspek-aspek penghambat dalam implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kualitas pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, antara lain:
 - 1) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

- 2) Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler
- 3) Kurang Pemahannya Masyarakat tentang program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bonita Regina, Saleh Soeaidy dan Heru Ribawanto. 2014. *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang* (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang), Jurnal Penelitian pendidikan, Vol. 2 No.2 Oktober 2014. Lembaga Pendidikan Universitas Negeri Malang: Malang.
- Edward III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Fatah, Nanang. 2006. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy.
- Ghozali, Imam. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Semarang: FE-UNDIP.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Karsidi, Rafik. 2007. *Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: LPP UMS dan UNS Pers.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 2013. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia.

- Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cet.X. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ninik Purwaning Setyorini. 2010. *Implementasi Program BOS 2009 di Sekolah Negeri Pada Komisariat SMPN 1 Bojonggede Kabupaten Bogor*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 11 No. 1 November 2010. Lembaga Pendidikan UPI Bandung: Bandung.
- Nadira Sukma Amiini. 2016. *Analisis Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014*, Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 12, Nomor 1 Februari 2016, LPTK dan ISPI.
- Prihadi, Syeful, F. 2004. *Assesment Centre, Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Rini, Riswanti. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Hasil Penelitian*. Universitas Lampung, Lampung.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryosubroto, B. 2010. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Layanan Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sallis Edward. 2006. *Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality Management in Education)* Penerjemah : Kambey Daniel C., Manado : Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
- Sowiyah. 2010. *Manajemen Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru (Studi Multi Situs pada Tiga Sekolah Dasar Negeri di Kota Makmur Provinsi Waway*, Desertasi Universitas Negeri Malang: Malang.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (eds). 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van, Meter, Donald, dan Carl Van Horn. 2006. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*, London: Sage.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jakarta: Media Prasindo.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 2 Agustus 2016

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

